



RENSTRA

DINKOMINFO KABUPATEN BANYUMAS

Tahun 2025-2029

DINKOMINFO KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.3.1. Maksud 4

 1.3.2. Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6

 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 31

 2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah 35

 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan 35

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 35

 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 35

 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah 36

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 39

 3.1. Tujuan 39

 3.2. Sasaran 39

 3.3. Strategi 41

 3.4. Arah Kebijakan 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 45

 4.2. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 66

 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 68

 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci 70

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah2

Gambar 1.2 Gambar Alur Keterhubungan Renstra Dengan Renja3

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinkominfo Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... 12

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinkominfo Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2024..... 13

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinkominfo Tahun 2024 13

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Banyumas berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya (2024-2026).....32

Tabel 2.5 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kominfo33

Tabel 2.6 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Statistik.....34

Tabel 2. 7 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Persandian34

Tabel 2.8 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....37

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo Tahun 2025-2029.....40

Tabel 3.2 Tabel Penahapan Renstra Dinkominfo Tahun 2025-202942

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan44

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkominfo Tahun 2025-2030.....48

Tabel 4.2 Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....66

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....69

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Banyumas70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk menyinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Kepala pemerintahan yang baru akan mengemban tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

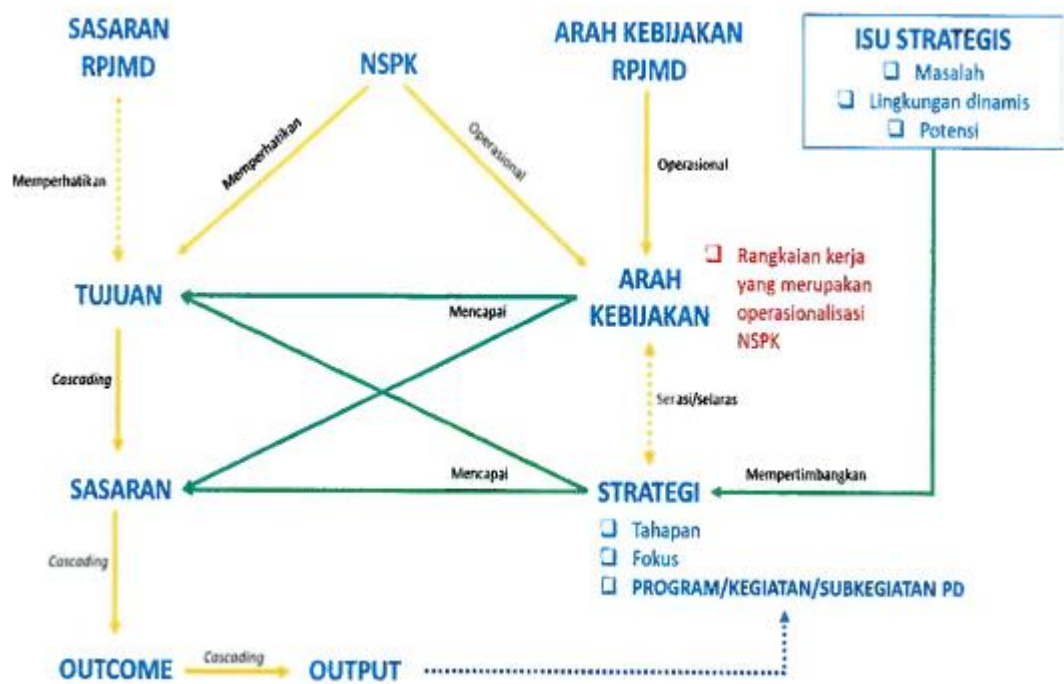
RPJMD Kabupaten Banyumas memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD. Renstra Dinkominfo merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinkominfo telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital RI, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

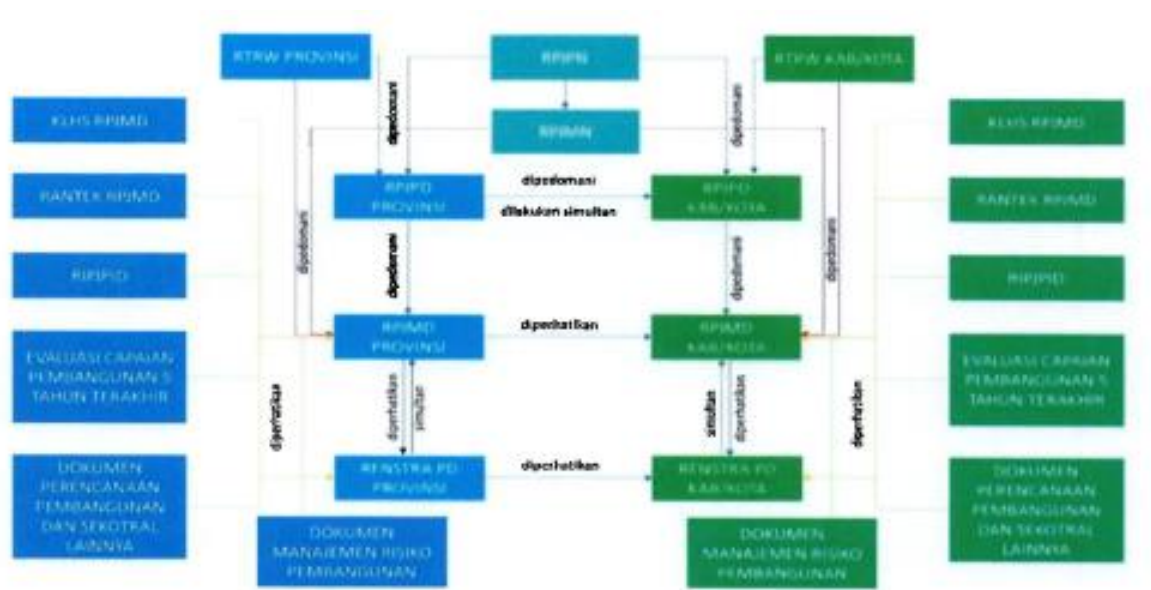
Keterkaitan antar dokumen ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut.

Gambar 1.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Tahapan penyusunan Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar berikut.

Gambar 1.2
Gambar Alur Keterhubungan Renstra Dengan Renja



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan kominfo, statistik, dan persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinkominfo Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinkominfo;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinkominfo;

3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah beserta data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif Perangkat Daerah dari tahun 2025 hingga tahun 20229 ditambah prakiraan maju rencana Tahun 2030.

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk menyinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat.

2.1.1.1. Tugas

Dinkominfo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kominfo, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

4. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1.3. Struktur

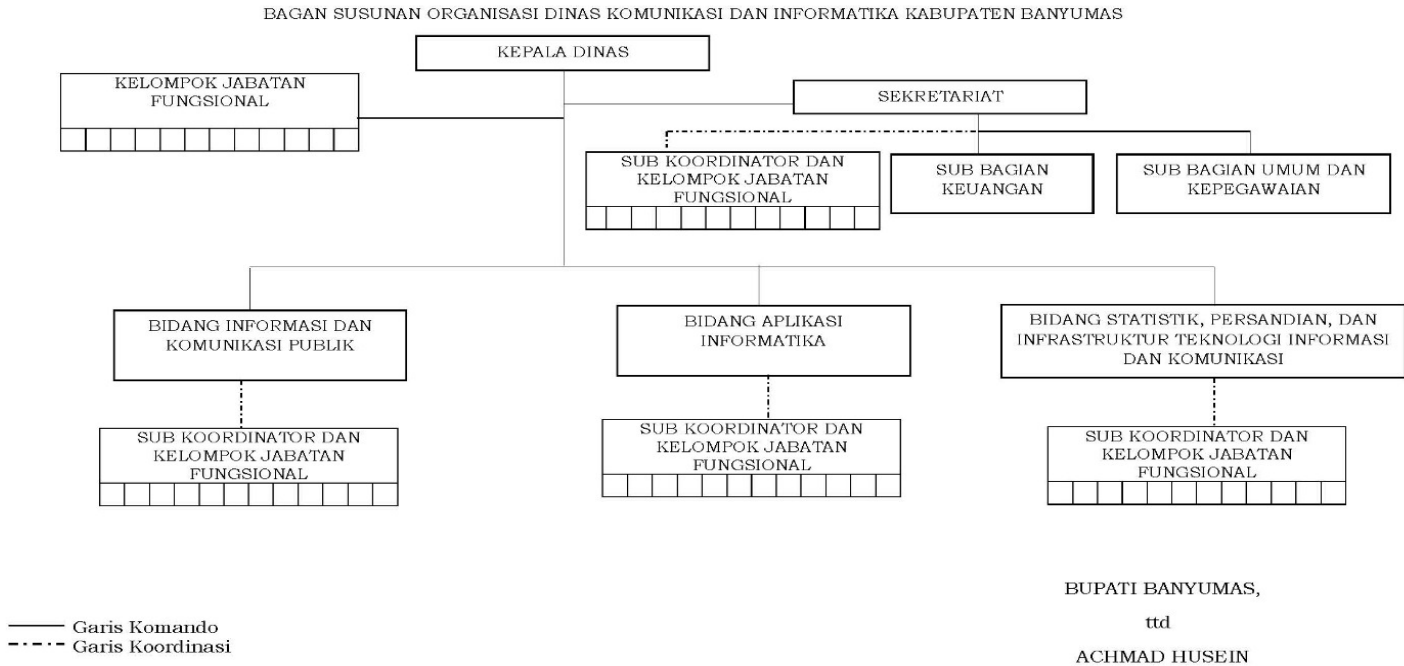
Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik, Persandian dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 95 Tahun 2021

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1. merumuskan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. melaksanakan kebijakan di bidang informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
4. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
4. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
5. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP), pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan; pengelolaan kepegawaian berupa penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan, penyusunan formasi; pemrosesan dan pengusulan

administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain); organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain; pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

D. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan daerah.

E. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang menjadi kewenangan daerah.

F. Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi, statistik, dan sandi yang menjadi kewenangan daerah.

G. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinkominfo pada akhir tahun 2024 sebanyak 110 orang, terdiri dari 33 PNS, 19 CPNS dan 58 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 54 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinkominfo Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	0	0	1	1
2	SMP Sederajat	2	0	5	7
3	SMA Sederajat	5	0	15	20
4	D1	0	0	0	0
5	D3	6	11	3	20
6	S1	12	8	34	54
7	S2	8	0	0	8
8	S3	0	0	0	0
Jumlah		33	19	58	110

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkominfo Tahun 2024

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 31 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinkominfo Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	17
3	Golongan III	31
4	Golongan IV	4
Jumlah		52

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkominfo Tahun 2024

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinkominfo Tahun 2024 meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinkominfo Tahun 2024

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.	132010304002	2	Portable Generating Set	2013	General/GFS 20-20 KW		APBD Kab.	64.900.000,00
2.	132010304002	1	Generating Set	2017	ISUZU	25 Kva	APBD Kab.	119.900.000,00
3.	132010304005	1	Automatic Charger	2017			APBD Kab.	5.500.000,00
4.	132010304005	2	Conecting	2017			APBD Kab.	500.000,00
5.	132010304005	3	Panel AMF/ATS	2017		25 Kva	APBD Kab.	17.750.000,00
6.	132010304005	4	Konekting	2017			APBD Kab.	1.250.000,00
7.	132020101003	1	Station Wagon	2007	Toyota		APBD Kab.	97.818.182,00
8.	132020101003	2	Station Wagon	2007	Toyota	1498 CC	APBD Kab.	115.909.000,00
9.	132020101003	1	Station Wagon	2012	Toyota	1495	APBD Kab.	206.447.392,00
10.	132020101003	1	Mobil	2013	TOYOTA	1329	APBD Kab.	171.216.129,00
11.	132020101003	1	Station Wagon	2014	Daihatsu		APBD Kab.	115.100.000,00
12.	132020101003	1	Station Wagon	2017	Toyota	1329 cc	APBD Kab.	193.435.532,00
13.	132020101003	2	Station Wagon	2017	Toyota		APBD Kab.	290.625.532,00
14.	132020103002	1	Station Wagon	2007	Toyota	1298 cc	APBD Kab.	110.000.000,00
15.	132020104001	1	Sepeda Motor	1996	Suzuki	100 CC	APBD	2.500.000,00
16.	132020104001	1	Sepeda Motor	2006	Honda	100 CC	APBD	10.500.000,00
17.	132020104001	2	Sepeda Motor	2006	Honda	125	APBD Kab.	9.000.000,00
18.	132020104001	1	Sepeda Motor	2007	Suzuki	110 CC	APBD	9.790.000,00
19.	132020104001	2	Sepeda Motor	2007	Suzuki	110 CC	APBD	8.900.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
20.	132020104001	1	Sepeda Motor	2009	Honda	110 CC	APBD Kab.	11.700.000,00
21.	132020104001	1	Sepeda Motor	2011	Suzuki	110 CC	APBD Kab.	9.973.828,00
22.	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	110	APBD Kab.	11.685.655,00
23.	132020104001	1	Sepeda Motor	2013	Yamaha	115 CC	APBD Kab.	12.369.882,00
24.	132020104001	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha	110	APBD Kab.	12.562.750,00
25.	132020104001	2	Sepeda Motor	2014	YAMAHA	150	APBD Kab.	22.900.000,00
26.	132020104001	3	Sepeda Motor	2014	YAMAHA	150	APBD Kab.	22.900.000,00
27.	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	APBD Kab.	24.674.293,00
28.	132020104001	2	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	APBD Kab.	24.674.293,00
29.	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	APBD Kab.	15.673.256,00
30.	132020104001	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	APBD Kab.	15.673.256,00
31.	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	113 cc	APBD Kab.	16.013.627,00
32.	132020104001	2	Sepeda Motor	2017	Yamaha	113 cc	APBD Kab.	16.013.627,00
33.	132020104001	3	Sepeda Motor	2017	Yamaha	125 cc	APBD Kab.	16.013.627,00
34.	132020104001	4	Sepeda Motor	2017	Yamaha	125 cc	APBD Kab.	16.013.627,00
35.	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	125cc	APBD Kab.	16.635.819,00
36.	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio		APBD Kab.	17.825.000,00
37.	132020104001	2	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio		APBD Kab.	17.825.000,00
38.	132030101041	1	Mesin Potong	2004	Dorong		APBD Kab.	460.000,00
39.	132030106003	1	Mesin Bor	2018	BOSCH	600 W	APBD Kab.	1.520.000,00
40.	132030302008	1	Test Commisioning	2016		2 USB Hub 4 Port	APBD Kab.	900.000,00
41.	132030305109	1	Alat Calibrasi Lainnya	2020		100M	APBD Kab.	2.584.000,00
42.	132030305109	2	Alat Calibrasi Lainnya	2020		0 - 2000 Ohm	APBD Kab.	2.928.200,00
43.	132030307010	1	Scanner	2016	Epson	A4, 4800 X 9600 dpi	APBD Kab.	2.350.000,00
44.	132040104004	1	Rak Server	2014			APBD Kab.	16.500.000,00
45.	132050104002	1-12	Almari Kayu 2 Pintu	1997			APBD Kab.	15.000.000,00
46.	132050104002	1	Lemari batu satu pintu	2008			APBD Kab.	2.108.650,00
47.	132050104002	2-7	Almari buku arsip	2008			APBD Kab.	15.120.000,00
48.	132050104002	8	Lemari Kayu	2008			Hibah	1.250.000,00
49.	132050104002	9	Lemari Kayu	2008			Hibah	1.000.000,00
50.	132050104002	10	Lemari Kayu	2008			Hibah	750.000,00
51.	132050104002	1	Lemari Kayu	2014			APBD Kab.	4.600.000,00
52.	132050104002	2-5	Lemari Kayu Arsip	2014			APBD Kab.	31.400.000,00
53.	132050104003	1	Rak Besi	1992			APBD Kab.	150.000,00
54.	132050104003	1-3	Rak Besi	2001		6 sap	APBD Kab.	900.000,00
55.	132050104003	1	Rak Besi	2005			APBD Kab.	800.000,00
56.	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2010			APBD Kab.	2.000.000,00
57.	132050104004	1-2	Lemari kayu	2007			APBD Kab.	4.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
58.	132050104004	1	Almari Kaca/Data Luncur	2009			APBD Kab.	2.500.000,00
59.	132050104007	1	Brankas	1993	Cobra		APBD Kab.	6.500.000,00
60.	132050104007	1	Brand Kas	1995	Cobra		APBD Kab.	8.200.000,00
61.	132050104008	1	Cash Boox/Peti Uang	2006	SG		APBD Kab.	725.000,00
62.	132050104009	1-2	Kardex Besi/Metal	1995			APBD Kab.	800.000,00
63.	132050104011	1	Rotary Filing	2002	Elite		APBD Kab.	6.500.000,00
64.	132050104026	1	Filing Kabinet 2 laci	2001	Brother		APBD Kab.	1.250.000,00
65.	132050104026	2	Filing Kabinet 2 Laci	2001	Lion		APBD Kab.	1.250.000,00
66.	132050104026	3	Filing Kabinet 2 Laci	2001	Lion		APBD Kab.	1.250.000,00
67.	132050104026	2	Filing Kabinet 4 Laci	2006	Elite		APBD Kab.	2.250.000,00
68.	132050104026	11	Filing Kabinet 4 Laci	2006	Ecotech		APBD Kab.	1.500.000,00
69.	132050104026	1-3	Filing Besi/Metal	2008	Elite	4 Laci	APBD Kab.	8.028.000,00
70.	132050104026	4-5	Filing Besi/Metal	2008	Elite	2 Laci	APBD Kab.	3.400.000,00
71.	132050104026	3	Filing Kabinet	2012	Datafile		APBD Kab.	3.017.000,00
72.	132050104026	1-2	Filing Besi/Metal	2013	Dolphin		APBD Kab.	6.000.000,00
73.	132050104026	1-2	Filing Besi	2014	Dolphin		APBD Kab.	6.300.000,00
74.	132050104026	1-2	Filing Besi/Metal	2018	BROTHER	4 Laci	APBD Kab.	6.000.000,00
75.	132050104027	1-2	Lemari Kaca	1995			APBD Kab.	1.000.000,00
76.	132050104027	1-3	Lemari Kaca	2005		2 pintu	APBD Kab.	2.000.000,00
77.	132050104027	4	Lemari Kaca	2005			APBD Kab.	2.000.000,00
78.	132050105003	1	Papan Nama/Data	2013			APBD Kab.	1.750.000,00
79.	132050105003	1	Papan Visual/Papan Nama	2022		100 x 150 cm	APBD Kab.	1.550.000,00
80.	132050105003	1	Papan Visual/Papan Nama	2023	N/A	27,387	APBD Kab.	44.991.363,00
81.	132050105005	1-3	White Board	1995			APBD Kab.	1.192.000,00
82.	132050105005	1	White Board	2007		160x120 cm	APBD Kab.	145.000,00
83.	132050105005	1	White Board	2013	Panda		APBD Kab.	1.450.000,00
84.	132050105005	1	White Board	2014		120x240cm	APBD Kab.	1.000.000,00
85.	132050105005	1	White Board	2017		120 x 240 cm	APBD Kab.	1.120.000,00
86.	132050105005	2	White Board	2017		120 x 240 cm	APBD Kab.	1.120.000,00
87.	132050105005	1	White Board	2018			APBD Kab.	1.100.000,00
88.	132050105010	1	Mesin Penghancur Kertas	2015	Primatech		APBD Kab.	3.900.000,00
89.	132050105012	1	Mesin Absensi	2014	Fingerprint		APBD Kab.	5.730.000,00
90.	132050105012	1	Mesin Absensi	2017	PRIMATECH	3 inch	APBD Kab.	4.000.000,00
91.	132050105012	1-3	Mesin Absensi	2021	Primatech	400 Face Capacity	APBD Kab.	14.895.000,00
92.	132050105033	1	Laser Pointer	2023	LOGITECH		APBD Kab.	950.000,00
93.	132050105034	1	Videotron Alun-Alun Purwokerto	2018			APBD Kab.	1.712.532.000,00
94.	132050105034	1	Videotron Alun-Alun Banyumas	2020			APBD Kab.	1.611.521.000,00
95.	132050105076	1	Papan Nama instansi	2011			APBD Kab.	2.485.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
96.	132050105088	1	Jaringan/Instalasi Internet	2010			APBD Kab.	9.850.000,00
97.	132050201002	1-2	Meja Kayu	1986			APBD Kab.	150.000,00
98.	132050201002	1-4	Meja Kayu	1992		1/2 biro	APBD Kab.	800.000,00
99.	132050201002	1-12	Meja Tulis	1995			APBD Kab.	4.080.000,00
100.	132050201002	1-8	Meja Kayu	2000		1/2 biro	APBD Kab.	50.000,00
101.	132050201002	9-14	Kursi Kayu	2000			APBD Kab.	35.000,00
102.	132050201002	1-6	Meja Kayu	2005		1/2 biro	APBD Kab.	1.200.000,00
103.	132050201002	7	Meja Kayu	2005		1 biro	APBD Kab.	1.660.000,00
104.	132050201002	1-2	Meja Kerja 1 Biro	2014			APBD Kab.	3.400.000,00
105.	132050201002	3-4	Kursi Kerja	2014			APBD Kab.	2.875.000,00
106.	132050201008	1-5	Meja Rapat	1995			APBD Kab.	2.342.500,00
107.	132050201008	1-3	Meja Rapat	2019		75 x 50 x 120	APBD Kab.	6.900.000,00
108.	132050201014	1-32	Meja Kerja 1/2 biro	1996			APBD Kab.	320.000,00
109.	132050201016	1	Meja Tambahan	2020	MAGNUM		APBD Kab.	999.000,00
110.	132050201024	1	Meja kerja	1980		1/2 biro	APBD Kab.	250.000,00
111.	132050201024	2	Meja 1/2 Biro	1980		1/2 biro	APBD Kab.	250.000,00
112.	132050201024	3-4	Meja 1/2 Biro	1980			APBD Kab.	75.000,00
113.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	1988			APBD Kab.	35.000,00
114.	132050201024	1-2	Meja 1/2 Biro	1989			APBD Kab.	50.000,00
115.	132050201024	1-2	Meja 1/2 Biro	1999			APBD Kab.	70.000,00
116.	132050201024	1-5	Meja 1/2 Biro	2008			APBD Kab.	4.800.000,00
117.	132050201024	6	Meja 1/2 Biro/ 1 biro	2008			APBD Kab.	400.000,00
118.	132050201024	1-10	Meja 1/2 Biro	2022		120 x 60 x 75 cm	APBD Kab.	21.400.000,00
119.	132050201024	1-8	Meja 1/2 Biro	2024	-		APBD Kab.	15.600.000,00
120.	132050201030	1-40	Kursi Rapat	2018	CHITOSE		APBD Kab.	21.200.000,00
121.	132050201030	1-12	Kursi Rapat	2019	Chitose	410 x 505 x 925	APBD Kab.	6.480.000,00
122.	132050201030	1-10	Kursi Rapat	2020	CHITOSE	410 X 505 X 925	APBD Kab.	5.500.000,00
123.	132050201030	11-30	Kursi Rapat	2023	POLARIS		APBD Kab.	10.500.000,00
124.	132050201030	31-60	Kursi Rapat	2024	Polaris		APBD Kab.	15.000.000,00
125.	132050201031	1	Mebelair	2014			APBD Kab.	9.800.000,00
126.	132050201031	1	Kursi Tamu	2019			APBD Kab.	4.000.000,00
127.	132050201031	1-2	Kursi Tamu	2020	MARINO		APBD Kab.	4.598.000,00
128.	132050201031	3	Kursi Tamu	2020		245 x 186 cm	APBD Kab.	5.850.000,00
129.	132050201032	1-3	Kursi Putar	2006			APBD Kab.	2.025.000,00
130.	132050201032	1	Kursi Putar	2007			APBD Kab.	2.500.000,00
131.	132050201032	1	Kursi Putar Sandaran Tangan	2019			APBD Kab.	3.400.000,00
132.	132050201033	1-12	Kursi Biasa	1995			APBD Kab.	3.000.000,00
133.	132050201035	1-2	Kursi Tunggu	2010	Fantoni		APBD Kab.	7.100.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
134.	132050201036	1-28	Kursi Lipat	2008	Futura		APBD Kab.	8.295.600,00
135.	132050201036	1-3	Kursi Stainless	2015			APBD Kab.	1.950.000,00
136.	132050201039	1-12	Meja Komputer	2019		95 x 60 x 75	APBD Kab.	19.200.000,00
137.	132050201039	1-5	Meja Komputer	2020		95 x 60 x 75 cm	APBD Kab.	9.000.000,00
138.	132050201048	1	Meja Tamu	2007			APBD Kab.	3.750.000,00
139.	132050201048	1-3	Meja Tamu	2008			APBD Kab.	6.145.000,00
140.	132050201048	2	Meja Tamu	2008			APBD Kab.	3.000.000,00
141.	132050201048	1	Sofa	2020	LORA		APBD Kab.	4.199.000,00
142.	132050201048	1-3	Kursi Sofa	2024	-		APBD Kab.	18.750.000,00
143.	132050203001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2018	SAMSUNG	1.3 Ltr	APBD Kab.	1.950.000,00
144.	132050203001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2019	Krisbow		APBD Kab.	2.950.000,00
145.	132050204001	1	Lemari Es	2010	LG		APBD Kab.	3.500.000,00
146.	132050204003	1	AC Unit	2010	LG	1/2 PK	APBD Kab.	3.700.000,00
147.	132050204003	1	AC Unit	2012	panasonic		APBD Kab.	3.765.000,00
148.	132050204003	1	AC Unit	2013	Alux		APBD Kab.	6.000.000,00
149.	132050204003	2-4	AC Unit	2013	AUX	1PK	APBD Kab.	11.925.000,00
150.	132050204003	5-6	AC Unit	2013			APBD Kab.	10.650.000,00
151.	132050204003	1	AC	2014	LG	1/2 PK	APBD Kab.	7.450.000,00
152.	132050204003	1-3	AC Unit	2015	Panasonic	1,5 PK	APBD Kab.	18.000.000,00
153.	132050204003	1	AC	2016	Panasonic 1 PK		APBD Kab.	4.550.000,00
154.	132050204003	1-2	AC Unit	2018	Daikin	1 pk	APBD Kab.	9.800.000,00
155.	132050204003	3	AC Unit	2018	DAIKIN	2 PK	APBD Kab.	9.150.000,00
156.	132050204003	1-2	AC Unit	2019	DAIKIN	2 PK	APBD Kab.	19.000.000,00
157.	132050204003	3	AC Unit	2019	DAIKIN	2 PK	APBD Kab.	9.450.000,00
158.	132050204003	4-7	AC Unit	2019	DAIKIN	1 PK	APBD Kab.	19.600.000,00
159.	132050204003	8-11	AC Unit	2019	DAIKIN	1 PK	APBD Kab.	19.600.000,00
160.	132050204003	1	AC Unit	2020	DAIKIN	2 PK	APBD Kab.	9.700.000,00
161.	132050204004	1	A.C. Split	2021	PANASONIC	1 PK	APBD Kab.	6.850.000,00
162.	132050204004	1	A.C. Split	2022	SHARP	1.5 PK	APBD Kab.	8.000.000,00
163.	132050204004	2-3	A.C. Split	2022	Daikin	2 PK	APBD Kab.	20.200.000,00
164.	132050204004	1	Air Conditioning (AC)	2024	Panasonic	1,5 PK	APBD Kab.	8.400.000,00
165.	132050204004	2	Air Conditioning (AC)	2024	Panasonic	1 PK	APBD Kab.	6.900.000,00
166.	132050204006	1	Kipas Angin	2007	Maspion	65 Watt	APBD Kab.	261.500,00
167.	132050204015	1	Alat Pendingin Lain - Lain	2020	UNIFLAIR		APBD Kab.	319.000.000,00
168.	132050206002	1	Televisi	2005	Soni flat	29"	APBD Kab.	5.060.000,00
169.	132050206002	1	Televisi	2013	LG		APBD Kab.	3.500.000,00
170.	132050206002	1	Televisi	2014	LG-50LN-5400		APBD Kab.	13.350.000,00
171.	132050206002	2	Televisi	2014	Thoshiba-24PB240		APBD Kab.	1.700.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
172.	132050206002	3	Televisi LED	2014	LG	22 Inch	APBD Kab.	1.950.000,00
173.	132050206002	1	Televisi LED	2016	Panasonic	32"	APBD Kab.	3.650.000,00
174.	132050206002	1	Smart TV UHD	2017	SONY	65 Inch	APBD Kab.	37.000.000,00
175.	132050206002	2	Full HD Flat Smart TV	2017	SAMSUNG	49 Inch	APBD Kab.	9.300.000,00
176.	132050206002	3	Smart TV UHD	2017	SONY	65 inch	APBD Kab.	37.000.000,00
177.	132050206002	4	Televisi	2017	Samsung	55 "	APBD Kab.	14.450.000,00
178.	132050206002	1	Televisi	2018	PANASONIC	32 inch	APBD Kab.	3.100.000,00
179.	132050206002	2-3	Televisi	2018	SAMSUNG	32 inch	APBD Kab.	5.460.000,00
180.	132050206002	4	Televisi	2018	SAMSUNG	55 inch	APBD Kab.	13.470.000,00
181.	132050206002	1	Televisi	2020	SAMSUNG	65 Inch	APBD Kab.	27.350.000,00
182.	132050206002	2-3	Televisi	2020	SHARP	42 Inch	APBD Kab.	17.380.000,00
183.	132050206002	1	Televisi	2023	SAMSUNG	43 inch	APBD Kab.	6.900.000,00
184.	132050206002	1	TV	2024	LG	43"	APBD Kab.	7.100.000,00
185.	132050206002	2	TV	2024	Samsung	65"	APBD Kab.	14.200.000,00
186.	132050206005	1	Amplifier	2010	Ica		APBD Kab.	1.500.000,00
187.	132050206005	1	Mixer Amplifier	2014	Pearl Sound System		APBD Kab.	1.600.000,00
188.	132050206006	1	Equalizer	2022	ASHLY	31 Band	APBD Kab.	1.716.600,00
189.	132050206007	1-4	Loudspeaker	2020	JBL	15 Inch	APBD Kab.	141.200.000,00
190.	132050206007	1	Loudspeaker	2022	Huper	15 Inch	APBD Kab.	13.275.000,00
191.	132050206007	1	Loudspeaker	2024	SHARP		APBD Kab.	2.280.000,00
192.	132050206008	1	Sound System	2006	Bristoon		APBD Kab.	4.900.000,00
193.	132050206008	1	Peralatan/Komponen Komunikasi (Sound System)	2009			APBD Kab.	17.420.000,00
194.	132050206008	1	Peralatan Sound System	2014	TOA		APBD Kab.	3.550.000,00
195.	132050206008	2	Speaker System	2014	Soundrenaline		APBD Kab.	4.950.000,00
196.	132050206009	1	DVD External	2010			APBD Kab.	3.000.000,00
197.	132050206013	2	Trasistor Megaphone	2001	Toa ER-1015 S		APBD Kab.	750.000,00
198.	132050206014	1	Microphone Videotron	2018			APBD Kab.	3.300.000,00
199.	132050206014	1	Microphone Wireless Clip On	2019	SENNHEISER		APBD Kab.	5.150.000,00
200.	132050206014	2	Microphone Wireless Clip On	2019	SENNHEISER		APBD Kab.	5.150.000,00
201.	132050206018	1	UPS	2006	APC		APBD Kab.	1.275.000,00
202.	132050206018	1-3	UPS	2008			APBD Kab.	1.125.000,00
203.	132050206018	1	UPS Stabilizer	2010	APV BR 1500 VA		APBD Kab.	13.600.000,00
204.	132050206021	1	Camera Vidio	2020	SONY		APBD Kab.	19.525.000,00
205.	132050206023	1	Camera	2010	SONY		APBD Kab.	3.300.000,00
206.	132050206029	1-3	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2008			APBD Kab.	18.750,00
207.	132050206032	1-2	Meja Tamu	1995			APBD Kab.	2.229.000,00
208.	132050206036	1	Tangga Alumunium	2018		5 meter	APBD Kab.	1.500.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
209.	132050206036	1	Tangga Alumunium	2019	KRISBOW	5 M	APBD Kab.	2.725.000,00
210.	132050206038	1	Dispencer	2010	TLC		APBD Kab.	1.600.000,00
211.	132050206038	1-2	Dispencer	2020	MIDEA	360 x 370 x 1120 mm	APBD Kab.	5.000.000,00
212.	132050206038	1-2	Dispenser	2021	POLYTRON	65 Watt	APBD Kab.	6.000.000,00
213.	132050206077	2-3	Tower Penangkal petir & grounding	2008			APBD Kab.	9.000.000,00
214.	132050206077	1	Korden	2018		410 x 220 cm	APBD Kab.	1.956.000,00
215.	132050206077	1	DVR + HDD CCTV	2019	WD Purple	16 Ch - 2 TB	APBD Kab.	3.390.000,00
216.	132050206077	2	Karpet Hijau	2019		10 Meter	APBD Kab.	520.000,00
217.	132050206077	3	Vertical Blend	2019			APBD Kab.	5.000.000,00
218.	132050206077	1	Alat Penangkal Petir Kantor Dinkominfo	2020			APBD Kab.	18.500.000,00
219.	132050207001	1	Alat Pemadam/Portable	2013			APBD Kab.	149.409.000,00
220.	132050301005	1-4	Meja Kerja Pejabat Eselon III satu biro	2024	-		APBD Kab.	13.000.000,00
221.	132050301006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon	2014			APBD Kab.	5.400.000,00
222.	132050301009	1-3	Kursi kerja rambangan	2009			APBD Kab.	1.245.000,00
223.	132050301009	4	Kursi kerja model tangan	2009			APBD Kab.	1.800.000,00
224.	132050301009	1-2	Meja Kerja	2014			APBD Kab.	2.650.000,00
225.	132050301009	1-10	Meja Rapat	2018		75x50x120 cm	APBD Kab.	23.000.000,00
226.	132050302013	1	Meja Telpon	2009			APBD Kab.	250.000,00
227.	132050303004	1	Kursi Kerja Eselon	2014			APBD Kab.	3.500.000,00
228.	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2020			APBD Kab.	3.450.000,00
229.	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2023	ACTIV	N/A	APBD Kab.	3.400.000,00
230.	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2024	Activ		APBD Kab.	3.450.000,00
231.	132050303006	1-5	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2011			APBD Kab.	8.000.000,00
232.	132050303008	1	Kursi Kerja Pegawai	2018	ERGOTEK		APBD Kab.	2.950.000,00
233.	132050303008	2	Kursi Kerja Pegawai	2018	ERGOTEK		APBD Kab.	2.950.000,00
234.	132050303008	3	Kursi Kerja Pegawai	2018	ERGOTEK		APBD Kab.	2.950.000,00
235.	132050303009	1-2	Kursi Kerja	2018	OUMA	610x480x1010 mm	APBD Kab.	5.200.000,00
236.	132050304007	1-20	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	2020	Chitose	410 x 505 x 925	APBD Kab.	11.000.000,00
237.	132050307007	1	Lemari Arsip	2001		10 laci	APBD Kab.	200.000,00
238.	132050307007	1	Lemari Arsip	2013			APBD Kab.	14.200.000,00
239.	132060101002	1	Mixer	2023	ASHLEY	4 channel	APBD Kab.	1.980.000,00
240.	132060101005	1	Power Mixer	2022	ASHLEY	4 Channel Mono	APBD Kab.	3.548.400,00
241.	132060101036	1-2	Microphone/Wireless MIC	2022	ASHLEY	12 volt	APBD Kab.	2.744.000,00
242.	132060101036	1-4	Microphone/Wireless MIC	2023	ASHLY		APBD Kab.	7.000.000,00
243.	132060101048	1	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2020	APC	10000 VA	APBD Kab.	89.100.000,00
244.	132060101072	1	DVD Radio Casette	2015			APBD Kab.	2.200.000,00
245.	132060101096	1	LCD Proy	2001	Toshiba		APBD Kab.	24.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
246.	132060101096	1	LCD Proy	2003	Sharp		APBD Kab.	43.000.000,00
247.	132060101096	1	LCD Proy	2004	Panasonic	PTLC 735 E	APBD Kab.	42.000.000,00
248.	132060101096	1	LCD Proy	2006	Benq Dip	MP 770	APBD Kab.	23.000.000,00
249.	132060101096	2	LCD Proyektor	2014	BenQ		APBD Kab.	10.575.000,00
250.	132060101096	3	vidio Conventer & Vidio Splinter	2014			APBD Kab.	2.220.000,00
251.	132060101096	4	Video 16 Chanel	2014	Compresion HMDI, H264		APBD Kab.	5.500.000,00
252.	132060101096	1	Camera	2017	NIKON		APBD Kab.	8.950.000,00
253.	132060101096	2	LCD Proyektor	2017	PHILIPS		APBD Kab.	8.600.000,00
254.	132060101096	1	Camera Digital	2018	CANON	24.2 Mp	APBD Kab.	14.850.000,00
255.	132060101096	2	LCD Proyektor	2018	HITACHI	1024X768 (XGA)	APBD Kab.	9.800.000,00
256.	132060101096	3	LCD Proyektor	2018	BENQ	3400 lumens	APBD Kab.	11.785.000,00
257.	132060101096	1-8	Camera Outdoor CCTV	2019	IR Dome	2 MP	APBD Kab.	6.600.000,00
258.	132060101096	9	Camera Digital Mirrorless	2019	PANASONIC	20.3 MP	APBD Kab.	13.610.000,00
259.	132060101096	10	Camera Drone	2019	MAVIC		APBD Kab.	26.400.000,00
260.	132060101096	11-13	Camera CCTV	2019			APBD Kab.	2.835.000,00
261.	132060101096	14	LCD Proyektor	2019	SONY		APBD Kab.	38.750.000,00
262.	132060101096	1-15	Alat Studio visual Lainnya	2020	B-TECH	55 Inch	APBD Kab.	112.500.000,00
263.	132060101096	16	Alat Studio visual Lainnya	2020	PHILLIPS	10 Inch	APBD Kab.	7.000.000,00
264.	132060101096	17	Alat Studio visual Lainnya	2020	PHILLIPS	86 Inch	APBD Kab.	290.800.000,00
265.	132060101096	18-19	Alat Studio visual Lainnya	2020	BELDEN		APBD Kab.	3.000.000,00
266.	132060101096	20	Alat Studio visual Lainnya	2020	ATEN		APBD Kab.	7.500.000,00
267.	132060101096	22	Alat Studio visual Lainnya	2020			APBD Kab.	197.655.000,00
268.	132060101096	52	Camera + Attachmen	2020	CANON	20 Megapiksel	APBD Kab.	5.000.000,00
269.	132060101096	53	Camera + Attachmen	2020	SONY		APBD Kab.	16.775.000,00
270.	132060101096	1-2	Earfun	2023	TWS		APBD Kab.	1.000.000,00
271.	132060102003	1	Kamera Remot Control	2014	Sony		APBD Kab.	14.900.000,00
272.	132060102006	1	DVD recorder	2007	Pioneer		APBD Kab.	7.400.000,00
273.	132060102012	1-15	Video Monitor	2020	PHILLIPS	55 Inch	APBD Kab.	1.590.000.000,00
274.	132060102015	1	Audio Mixer	2007			APBD Kab.	4.600.000,00
275.	132060102015	1	Digital Audio Mixer	2014	Yamaha		APBD Kab.	7.250.000,00
276.	132060102015	2	Mixer Amplyfier	2014			APBD Kab.	2.700.000,00
277.	132060102015	3	Mixer Ampyfiere	2014			APBD Kab.	940.000,00
278.	132060102015	4	Mixer Ampyfier	2014			APBD Kab.	2.045.000,00
279.	132060102015	5	Mixer Amplifiere	2014	Yamaha		APBD Kab.	8.000.000,00
280.	132060102015	1	Audio Mixser	2015			APBD Kab.	12.650.000,00
281.	132060102015	1	Video Mixer	2019	DataVideo	4 Chanel	APBD Kab.	19.700.000,00
282.	132060102045	1-2	Tripod Camera	2003			APBD Kab.	6.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
283.	132060102045	1-2	Tripord Camera	2014	Exsell		APBD Kab.	4.000.000,00
284.	132060102061	1	Lensa Camera	2020	CANON	50 mm	APBD Kab.	2.420.000,00
285.	132060102061	1	Lensa Kamera	2023	SONY	200 MM	APBD Kab.	19.850.000,00
286.	132060102072	1	Audio Aqualizer	2015			APBD Kab.	2.750.000,00
287.	132060102100	1-2	Camera CCTV Indoor	2014	Infinity		APBD Kab.	1.320.000,00
288.	132060102100	3-4	Camera CCTV Bullet	2014	Infinity		APBD Kab.	1.450.000,00
289.	132060102100	5	Perlengkapan CCTV	2014			APBD Kab.	2.410.000,00
290.	132060102100	6	Comcorder	2014	Sony		APBD Kab.	14.800.000,00
291.	132060102100	7	Kamera	2014	Nikon		APBD Kab.	6.000.000,00
292.	132060102105	1	Layar Film	2004			APBD Kab.	1.600.000,00
293.	132060102105	1	Layar Film	2006			APBD Kab.	4.750.000,00
294.	132060102116	1	Head Set	2015	Panasonic	RJ-11 Conector	APBD Kab.	600.000,00
295.	132060102164	1	Professional Camcorder	2019	SONY		APBD Kab.	18.700.000,00
296.	132060102164	1	Peralatan Studio Lain-lain	2020	HYBRID		APBD Kab.	230.000.000,00
297.	132060102164	2	Peralatan Studio Lain-lain	2020			APBD Kab.	33.000.000,00
298.	132060102164	3	Peralatan Studio Lain-lain	2020	DJI		APBD Kab.	2.750.000,00
299.	132060102164	4	Peralatan Studio Lain-lain	2020	DJI		APBD Kab.	7.810.000,00
300.	1,3206E+11	5	Peralatan Studio Lain-lain	2020	EZCAP		APBD Kab.	2.860.000,00
301.	132060102164	6	Peralatan Studio Lain-lain	2020	CANON		APBD Kab.	880.000,00
302.	132060102164	7	Peralatan Studio Lain-lain	2020	ZOOM		APBD Kab.	1.980.000,00
303.	132060104014	1	Mesin Jilrit Kertas	2007			APBD Kab.	3.500.000,00
304.	1,3206E+11	1	Drone	2023	DJI		APBD Kab.	31.000.000,00
305.	132060105053	1	GPS Touchscreen	2018	GARMIN	4 inch	APBD Kab.	9.515.000,00
306.	132060106001	1	HDMI Wirelesss	2023	Hollyland		APBD Kab.	9.600.000,00
307.	132060106001	2-4	Green Screen	2023	Tanpa Merk		APBD Kab.	1.785.000,00
308.	132060201001	1	Pesawat PABX	2003			APBD Kab.	50.000,00
309.	132060201001	1	Telephone (PABX)	2008	Panasonic		APBD Kab.	50.000,00
310.	132060201001	2-4	Telephone (PABX)	2008			APBD Kab.	150.000,00
311.	132060201001	5	PABX	2008			APBD Kab.	50.000,00
312.	132060201001	1	Alat Alat Telephone (PABX)	2012			APBD Kab.	50.760.000,00
313.	132060201001	2	Komponen Komunikasi (PABX)	2012			APBD Kab.	35.380.000,00
314.	132060201001	1	Main Unit PABX	2013	Panasonic		APBD Kab.	25.615.000,00
315.	132060201001	2	16 Portanalogue trunk card	2013	Panasonic		APBD Kab.	6.725.000,00
316.	132060201001	3-6	16 Port single line ext card PABX	2013	Panasonic		APBD Kab.	16.680.000,00
317.	132060201001	7	16 Port digital extension (PABX)	2013	Panasonic		APBD Kab.	4.685.000,00
318.	132060201001	8-9	VOIP DSP 16 Chanel (PABX)	2013	Panasonic		APBD Kab.	12.760.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
319.	132060201001	10	Digital proprietary Telephone 3 Line (PABX)	2013	Panasonic		APBD Kab.	2.400.000,00
320.	132060201001	11	DDS CONSOLE 60 BUTTON(PABX)	2013	Panasonic		APBD Kab.	2.500.000,00
321.	132060201001	1-2	Main Unit Telephone (PABX)	2015	Panasonic	430X367 mm	APBD Kab.	19.800.000,00
322.	132060201001	1	Telephone (PABX)	2018		12 Extension	APBD Kab.	13.250.000,00
323.	132060201001	1-4	Telephone (PABX)	2019	Panasonic	24 Port SLT Card	APBD Kab.	64.000.000,00
324.	132060201001	5	Digital Proprietary Telephone	2019	Panasonic		APBD Kab.	6.235.000,00
325.	132060201003	1-4	Pesawat Telephone	2008			APBD Kab.	446.000,00
326.	132060201003	5-11	Pesawat Telephone	2008			Hibah	350.000,00
327.	132060201003	12-14	Pesawat Telephone	2008			APBD Kab.	900.000,00
328.	132060201003	15-16	Pesawat Telephone	2008	Panasonic		APBD Kab.	600.000,00
329.	132060201003	17	Pesawat Telephone	2008	Panasonic		APBD Kab.	1.400.000,00
330.	132060201003	1-20	Single Line Telepon 9 SLT	2009	Panasonic	13 Station	APBD Kab.	7.700.000,00
331.	132060201003	21-24	Pesawat Telephone	2009			APBD Kab.	1.200.000,00
332.	132060201004	1	Hand Phone	2020	XIAOMI	6.67 Inch	APBD Kab.	7.975.000,00
333.	132060201006	1	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2018	Yaesu		APBD Kab.	4.756.000,00
334.	132060201006	2-3	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2018	Yaseu		APBD Kab.	9.512.000,00
335.	132060201006	1-4	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2019	MOTOROLA	8 Channel	APBD Kab.	3.982.000,00
336.	132060201007	1	Telex	2001	Siemens		APBD Kab.	3.500.000,00
337.	132060201007	1-6	Antena Telex	2005	Hygene		APBD Kab.	5.745.000,00
338.	132060201007	1-5	Antena Telex	2006	Hygene		APBD Kab.	5.800.000,00
339.	132060201010	1	Faksimile	2005	Panasonik		APBD Kab.	4.000.000,00
340.	132060201010	2	Faksimile	2007	Brother		APBD Kab.	5.900.000,00
341.	132060201010	1	Faksimile	2008			APBD Kab.	3.900.000,00
342.	132060201010	1	Faksimile	2009			APBD Kab.	23.750.000,00
343.	132060201010	1-8	Faksimile	2012			APBD Kab.	15.200.000,00
344.	132060201010	1	Faksimile	2013	Panasonic		APBD Kab.	1.998.500,00
345.	132060201010	2	Faksimile	2013			APBD Kab.	3.575.000,00
346.	132060201010	1	Faksimile	2014	Panasonic		APBD Kab.	1.500.000,00
347.	132060201010	1-15	Faksimile Thermal Paper	2017	PANASONIC		APBD Kab.	27.000.000,00
348.	132060201010	16	Faksimile	2017	Panasonic	A4	APBD Kab.	1.750.000,00
349.	132060201010	1	Faksimile	2018	PANASONIC	26 ppm	APBD Kab.	7.770.000,00
350.	132060201010	1	Faksimile	2019	PANASONIC		APBD Kab.	6.000.000,00
351.	132060201010	2	Faksimile	2019	PANASONIC		APBD Kab.	1.900.000,00
352.	132060201022	1-3	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	2008			APBD Kab.	18.450.000,00
353.	132060201022	4	Radio Walkie Talkie	2008	Karce		APBD Kab.	1.650.000,00
354.	132060201022	1	Alat Komunikasi	2012			APBD Kab.	13.000.000,00
355.	132060201022	2	Terminal Box Telepone	2013	Panasonic		APBD Kab.	700.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
356.	132060201022	9-11	Aki kering 38 A Delkor Perlengkapan komunikasi	2013	Panasonic		APBD Kab.	2.520.000,00
357.	132060201022	12	Peralatan Komunikasi PABX	2013	Panasonic		APBD Kab.	1.000.000,00
358.	132060201022	13	Kabel telepon in dor 1 pair	2013	PCV Kabel	20x2x0,6 mm	APBD Kab.	1.350.000,00
359.	132060201022	14	Kabel telepon outdoor 20 pair PABX	2013		100 m	APBD Kab.	3.960.000,00
360.	132060201022	15	Kabel Telepon Dropiwire PABX	2013		1x2x0,6 / 1000 m	APBD Kab.	3.900.000,00
361.	132060201022	16	Box Panel PABX	2013		20x30x15 cm / 8 bh	APBD Kab.	2.160.000,00
362.	132060201022	17	Arester krone, 10 pair PABX	2013		20 buah	APBD Kab.	880.000,00
363.	132060201022	18	Tia besi Penyangga Kabel PABX	2013		1 dim / 6 buah	APBD Kab.	690.000,00
364.	132060201022	19-29	Facsimili (terminal) PABX	2013			APBD Kab.	21.450.000,00
365.	132060201022	30	Facsimili (Multi funtion type)	2013			APBD Kab.	5.350.000,00
366.	132060201022	31	Kabel Coaxial RG 8 Peralatan PABX	2013		300 m	APBD Kab.	7.050.000,00
367.	132060201022	1-2	Box MDF	2015		20X30	APBD Kab.	1.500.000,00
368.	132060201022	3-4	Box MDF	2015		20X30	APBD Kab.	1.500.000,00
369.	132060201022	5-6	Grounding System	2015		<0,5	APBD Kab.	5.000.000,00
370.	132060201022	7-10	External Card CID	2015	Panasonic	16 Port	APBD Kab.	14.000.000,00
371.	132060201022	11	Caller ID Card	2015	Panasonic	8 Port	APBD Kab.	5.200.000,00
372.	132060201022	12	SLT Ext Card	2015	Panasonic	16 Port	APBD Kab.	4.900.000,00
373.	132060201022	13	SLT Ext Card	2015	Panasonic		APBD Kab.	4.900.000,00
374.	132060201022	14	Jamer Signal HP (GSM, CDMA, 3G, Wifi)	2015	Jammcorp		APBD Kab.	6.200.000,00
375.	132060201022	15	Jamer Signal HP (GSM, CDMA, 3G, Wifi)	2015	Jammcorp		APBD Kab.	6.200.000,00
376.	132060201022	17-21	Faximile	2015	Panasonic		APBD Kab.	9.125.000,00
377.	132060201022	1-2	Handphone	2021	Samsung	6.5 inches	APBD Kab.	18.000.000,00
378.	132060203001	1	Radio FHF/Fm	2005	Kenwood		APBD Kab.	1.900.000,00
379.	132060203001	2-6	Radio FHF/FM	2005	Icom		APBD Kab.	14.250.000,00
380.	132060203001	1-5	Radio FHF/FM	2006	Icom		APBD Kab.	14.375.000,00
381.	132060203001	1-11	Power supply 30 A	2013			APBD Kab.	12.265.000,00
382.	132060203001	12-19	Power suply 30 A	2013			APBD Kab.	8.920.000,00
383.	132060203005	1-11	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	2013		65 W OUTPUT	APBD Kab.	28.105.000,00
384.	132060203005	1	Repeater	2017	Motorola		APBD Kab.	68.692.577,00
385.	132060203005	2	Antena Omni	2017		12 dbi	APBD Kab.	12.092.577,00
386.	132060203005	3	Stang antena dan Bracket	2017			APBD Kab.	1.792.577,00
387.	132060203005	4	Duplexer (Kabel + Conector)	2017	CELWAVE	350 - 360 MHz	APBD Kab.	12.302.577,00
388.	132060203005	5	Surge Arrester Antena	2017	DIAMOND		APBD Kab.	1.567.577,00
389.	132060203005	6	Batterie Backup System + Kabel	2017	ENERSYS		APBD Kab.	5.667.577,00
390.	132060203005	7	Grounding Kit	2017			APBD Kab.	1.792.577,00
391.	132060203005	8	Open Rack	2017		19 inch	APBD Kab.	4.092.577,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
392.	132060203005	9	PDU + Arrester	2017			APBD Kab.	1.842.577,00
393.	132060203005	10	Repeater Link System	2017	UBIQUITY	30 dbi	APBD Kab.	18.417.577,00
394.	132060204001	1-8	Unit Transceiver VHF Portable	2012			APBD Kab.	19.600.000,00
395.	132060204004	1	Kabel coaxial RG-8	2012		200 m	APBD Kab.	4.300.000,00
396.	132060204004	1	Alat Komunikasi Radio VHF/FM	2015	Icom		APBD Kab.	2.850.000,00
397.	132060204004	2-5	Alat Komunikasi Radio VHF /FM	2015	Icom		APBD Kab.	11.400.000,00
398.	132060205001	1-12	Radio UHF/VHF	2017	ICOM		APBD Kab.	33.600.000,00
399.	132060205001	13	Handy Talky (Digital Portable Radio)	2017	MOTOROLA	350-400 MHz	APBD Kab.	11.192.577,00
400.	132060205001	14-15	Handy Talky (Digital Portable Radio)	2017	MOTOROLA	350-400 Mhz	APBD Kab.	16.785.153,00
401.	132060205004	1-12	Power Suply	2017	RCE		APBD Kab.	14.400.000,00
402.	132060319001	1	Switch Manageble	2014			APBD Kab.	3.850.000,00
403.	132060320005	1-5	Switch Hub 16 Port	2013			APBD Kab.	4.500.000,00
404.	132060320005	6-9	Switch Hub 24 Port	2013			APBD Kab.	7.600.000,00
405.	132080108041	1	Matrial Instalasi	2015			APBD Kab.	1.400.000,00
406.	132080113081	2	TV Monitor	2011	Samsung	22 inci	APBD Kab.	1.750.000,00
407.	132080114004	1	Kulkas Satu Pintu	2016	Panasonic		APBD Kab.	2.300.000,00
408.	132080115006	1	Power Supply	2015	Edakai		APBD Kab.	1.100.000,00
409.	132080115006	2-5	Power Supply	2015	Edakai		APBD Kab.	4.400.000,00
410.	132080141100	1	Generator	2001	Yamaha		APBD Kab.	8.000.000,00
411.	132080141100	1	Generator	2006			APBD Kab.	4.250.000,00
412.	132080141412	1	tabung pemadam kebakaran	2012	Propektor		APBD Kab.	756.000,00
413.	132080141412	2-4	tabung Pemadam Kebakaran	2012	Propektor	4,5	APBD Kab.	2.268.000,00
414.	132080141412	1	Alat Pemadam Kebakaran	2020			APBD Kab.	194.000.000,00
415.	132080156081	1-8	Meja Kerja	2023	Tanpa Merk	140 x 60 x75 cm	APBD Kab.	22.900.000,00
416.	132080304043	1	Layar LCD	2014	Hitachi		APBD Kab.	3.250.000,00
417.	132080304043	1	3 Line LCD Digital	2015	Panasonic		APBD Kab.	2.700.000,00
418.	132080304043	2	1 Line LCD Digital Propierary Telephone	2015	Panasonic		APBD Kab.	2.100.000,00
419.	132080304043	3-4	1 Line LCD Digital Propierary Telephone	2015	Panasonic		APBD Kab.	4.200.000,00
420.	132080304043	5	1 Line LCD Digital Propierary Telephone	2015	Panasonic		APBD Kab.	2.100.000,00
421.	132080304043	6	3 Line LCD Digital	2015	Panasonic		APBD Kab.	2.700.000,00
422.	132090110015	1-2	Dispenser	2014	Madona		APBD Kab.	2.550.000,00
423.	132090110015	3-4	Dispenser	2014			APBD Kab.	2.892.500,00
424.	1,3209E+11	1	Kamera Digital	2023	EOS	18-55 mm IS STM	APBD Kab.	9.950.000,00
425.	132100101001	2	Komputer Mainframe Server	2007	-		APBD Kab.	4.500.000,00
426.	132100101001	3-6	Komputer Mainframe Server	2007			APBD Kab.	18.000.000,00
427.	132100101001	7-12	Komputer Mainframe Server	2007			APBD Kab.	27.000.000,00
428.	132100101001	1	Mainframe	2018	DELL	1x1 TB NLSAS	APBD Kab.	54.250.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
429.	132100101008	1	Komputer PC	2015	Asus Prossessor Core i3 - 4170		APBD Kab.	8.600.000,00
430.	132100102001	1	Komputer Personal Computer Unit (PC) lengkap	2013	HP Pavilion		APBD Kab.	6.820.000,00
431.	132100102001	2	Komputer (PC)	2013	acer aspire		APBD Kab.	8.430.000,00
432.	132100102001	1	Komputer	2014	Dell Inspiron One		APBD Kab.	14.950.000,00
433.	132100102001	2	Komputer Unit (PC)	2014	Asus M32AD		APBD Kab.	8.980.000,00
434.	132100102001	3	Komputer Unit (PC)	2014			APBD Kab.	7.600.000,00
435.	132100102001	1	Personal Computer	2016	Asus		APBD Kab.	13.800.000,00
436.	132100102001	2	Personal Computer Mainframe/Server	2016	Supermicro		APBD Kab.	31.900.000,00
437.	132100102001	4	Personal Computer Unit (PC)	2016	All in one HP		APBD Kab.	8.600.000,00
438.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	HP	20 inch	APBD Kab.	14.537.530,00
439.	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2017	HP	20 inch	APBD Kab.	14.537.530,00
440.	132100102001	3	Personal Computer Unit (PC)	2017	LENOVO		APBD Kab.	5.209.136,00
441.	132100102001	4-5	Personal Computer Unit (PC)	2017	ASUS		APBD Kab.	17.400.000,00
442.	132100102001	6-9	Personal Computer Unit (PC)	2017	DELL	18,5 inch	APBD Kab.	40.100.000,00
443.	132100102001	10	Personal Computer Unit (PC)	2017	ACER	21,5"	APBD Kab.	10.464.000,00
444.	132100102001	11-12	Personal Computer Unit (PC)	2017	HP	20 inch	APBD Kab.	19.574.400,00
445.	132100102001	1-3	Personal Computer Unit (PC)	2018	ASUS	21.5 inch	APBD Kab.	20.700.000,00
446.	132100102001	4	Personal Computer Unit (PC) All In One	2018	LENOVO	21.5 inch	APBD Kab.	11.450.000,00
447.	132100102001	5	Personal Computer Unit (PC) All In One	2018	DELL	1 TB	APBD Kab.	12.661.000,00
448.	132100102001	6	Personal Computer Unit (PC) All In One	2018	LENOVO	21.5 inch	APBD Kab.	9.995.000,00
449.	132100102001	1-3	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	ASUS	21,5 inch	APBD Kab.	31.800.000,00
450.	132100102001	4	Personal Computer Unit (PC) All In One	2019	HP	21.5 Inchi	APBD Kab.	8.925.000,00
451.	132100102001	5	Personal Computer Unit (PC)	2019	ASUS	18,5 Inchi	APBD Kab.	14.800.000,00
452.	132100102001	6	Personal Computer Unit (PC)	2019	ASUS	18,5 Inchi	APBD Kab.	14.500.000,00
453.	132100102001	7	Personal Computer Unit (PC)	2019	ASUS	18,5 Inchi	APBD Kab.	11.000.000,00
454.	132100102001	8-17	Personal Computer Unit (PC) All In One	2019	LENOVO	22 Inchi	APBD Kab.	118.580.000,00
455.	132100102001	1-5	Personal Computer Unit (PC)	2020	ASUS	24 Inch	APBD Kab.	84.425.000,00
456.	132100102001	6-11	Personal Computer Unit (PC)	2020	DELL	23.6 Inch	APBD Kab.	180.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
457.	132100102001	1	P.C Unit	2022	ACER	22 Inch	APBD Kab.	14.750.000,00
458.	132100102001	1	P.C Unit	2023	ASUS	19,5 inch	APBD Kab.	16.000.000,00
459.	132100102001	2	P.C Unit	2023	ZOAN	21.5 inci	APBD Kab.	15.800.000,00
460.	132100102002	5	Lap Top	2012	Thosiba	14 in	APBD Kab.	9.750.000,00
461.	132100102002	1	Lap Top	2017	ASUS		APBD Kab.	18.716.736,00
462.	132100102002	2	Lap Top	2017	APPLE		APBD Kab.	17.814.711,00
463.	132100102002	3	Lap Top	2017	DELL	14 Inch	APBD Kab.	13.000.000,00
464.	132100102002	4-6	Lap Top	2017	DELL		APBD Kab.	43.980.000,00
465.	132100102002	7	Lap Top	2017	DELL		APBD Kab.	15.000.000,00
466.	132100102002	8	Lap Top	2017	DELL		APBD Kab.	14.980.000,00
467.	132100102002	9	Lap Top	2017	DELL	14 inch	APBD Kab.	13.495.000,00
468.	132100102002	10	Lap Top	2017	ASUS		APBD Kab.	18.716.500,00
469.	132100102002	11	Lap Top	2017	HP	13,3 Inch	APBD Kab.	14.850.000,00
470.	132100102002	12	Lap Top	2017	DELL	13,3 inch	APBD Kab.	14.600.000,00
471.	132100102002	13	Lap Top	2017	HP	14 inch	APBD Kab.	14.150.000,00
472.	132100102002	14	Lap Top	2017	APPLE		APBD Kab.	19.850.000,00
473.	132100102002	15-16	Lap Top	2017	Macbook Air	13,3 "	APBD Kab.	29.765.400,00
474.	132100102002	1-2	Lap Top	2018	ASUS	13.3 inch	APBD Kab.	38.500.000,00
475.	132100102002	3-6	Lap Top	2018	ASUS	14 inch	APBD Kab.	47.600.000,00
476.	132100102002	7	Lap Top	2018	ACER	14 inch	APBD Kab.	8.792.700,00
477.	132100102002	8	Lap Top	2018	DELL	15.6 inch	APBD Kab.	20.237.000,00
478.	132100102002	9	Lap Top	2018	HP	13.3 inch	APBD Kab.	23.437.000,00
479.	132100102002	10	Lap Top	2018	MSI	15.6 inch	APBD Kab.	17.150.000,00
480.	132100102002	11-12	Lap Top	2018	HP	14 inch	APBD Kab.	22.815.000,00
481.	132100102002	1-2	Lap Top	2019	ACER	15.6 Inci Full HD IPS Display	APBD Kab.	23.270.000,00
482.	132100102002	1-2	Lap Top	2020	LENOVO	14 Inch	APBD Kab.	34.520.000,00
483.	132100102002	3	Lap Top	2020	LENOVO	14 inchi	APBD Kab.	6.975.000,00
484.	132100102002	4	Lap Top	2020			APBD Kab.	29.260.000,00
485.	132100102002	1	Lap Top	2021	ASSUS	14 inch	APBD Kab.	14.915.000,00
486.	132100102002	1	Lap Top	2022	ACER	14 Inc	APBD Kab.	14.350.000,00
487.	132100102002	2-7	Lap Top	2022	MSI	14 Inch	APBD Kab.	148.166.000,00
488.	132100102002	1	Lap Top	2023	ASUS	14 inch	APBD Kab.	15.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
489.	132100102002	3	Lap Top	2023	ASUS	14 inci	APBD Kab.	15.000.000,00
490.	132100102002	4	Lap Top	2023	ASUS	15.6 inci	APBD Kab.	24.750.000,00
491.	132100102002	6	Lap Top	2023	ASUS	14 inch	APBD Kab.	14.900.000,00
492.	132100102002	7-12	Lap Top	2023	MSI	14 inch	APBD Kab.	179.400.000,00
493.	132100102002	13	Lap Top	2023	ASUS	14 inch	APBD Kab.	14.900.000,00
494.	132100102002	1-2	Lap Top	2024	ACER	14"	APBD Kab.	29.600.000,00
495.	132100102002	3-4	Lap Top	2024	Asus	14"	APBD Kab.	59.000.000,00
496.	132100102003	1	Note Book	2013	Sony		APBD Kab.	10.900.000,00
497.	132100102003	1-4	Note Book	2014	Asus		APBD Kab.	25.400.000,00
498.	132100102003	5-8	Note Book	2014	Asus/A550CC-XX470D		APBD Kab.	37.400.000,00
499.	132100102003	1-2	Note Book	2017	HP		APBD Kab.	15.400.190,00
500.	132100102003	1-4	Note Book	2020	LENOVO	14 Inch	APBD Kab.	46.640.000,00
501.	132100102003	1	Note Book	2022	HP	14 Inchi	APBD Kab.	9.240.000,00
502.	132100102003	2	Note Book	2022	HP	14 Inchi	APBD Kab.	9.240.000,00
503.	132100102003	3	Note Book	2022	HP	14 Inchi	APBD Kab.	9.240.000,00
504.	132100102010	1-2	Tablet	2017	SAMSUNG	8 inch	APBD Kab.	10.050.000,00
505.	132100102010	3	Tablet	2017	SAMSUNG		APBD Kab.	11.200.000,00
506.	132100102010	1	Tablet	2018	SAMSUNG	10.1 inch	APBD Kab.	4.816.000,00
507.	132100102010	2	Tablet	2018	APPLE	9.7 inch	APBD Kab.	6.910.000,00
508.	132100103001	1-7	RAM Server	2017	VGEN	4 GB	APBD Kab.	7.000.000,00
509.	132100103001	8	Rak Seerver	2017			APBD Kab.	21.000.000,00
510.	132100201012	1-6	Harddisk Server	2017	WESTERN DIGITAL	2 TB	APBD Kab.	14.700.000,00
511.	132100201012	7-8	Harddisk Server	2017	SEAGATE	2 TB	APBD Kab.	3.000.000,00
512.	132100201012	1-2	Harddisk Eksternal	2018	WD	2 TB	APBD Kab.	2.440.000,00
513.	132100201012	3-4	Harddisk Eksternal	2018	WD	2 TB	APBD Kab.	3.800.000,00
514.	132100201012	5-7	Harddisk Eksternal	2018	WD	1 TB	APBD Kab.	2.940.000,00
515.	132100202009	1	Scanner	2008			APBD Kab.	3.200.000,00
516.	132100202017	2	Printer	2013	Epson		APBD Kab.	2.240.000,00
517.	132100202017	3-4	Printer	2013	Canon		APBD Kab.	1.700.000,00
518.	132100202017	1-2	Printer	2014	Epson		APBD Kab.	4.800.000,00
519.	132100202017	3	Printer	2014	Canon		APBD Kab.	900.000,00
520.	132100202017	1	Printer	2015	HP Laser Jet		APBD Kab.	2.800.000,00
521.	132100202017	2	Printer	2015	HP Laser Jet Pro P1102w		APBD Kab.	1.500.000,00
522.	132100202017	1	Printer	2016	Epson/ Injek	720 x 720 doi	APBD Kab.	2.200.000,00
523.	132100202017	2	Printer Laser	2016	HP Pro m177 fw		APBD Kab.	6.450.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
524.	132100203002	1	LED Monitor	2017	VIEWSONIC	23,6 inch	APBD Kab.	2.550.000,00
525.	132100203002	1-8	Monitor	2018	VIEWSONIC	21.5 inch	APBD Kab.	15.584.000,00
526.	132100203002	9	Monitor	2018	BENQ	32 inch	APBD Kab.	8.754.500,00
527.	132100203002	10	Monitor	2018	VIEWSONIC	24 inch	APBD Kab.	2.690.000,00
528.	132100203002	1	Monitor	2022	SGP	32 Inchi	APBD Kab.	2.500.000,00
529.	132100203002	1-6	Monitor LED	2023	LG	24 inch	APBD Kab.	11.850.000,00
530.	132100203002	1	LED Monitor	2024	LG	24"	APBD Kab.	2.600.000,00
531.	132100203002	2	LED Monitor	2024	LG	24"	APBD Kab.	2.600.000,00
532.	132100203003	12	Printer	2012	Canon		APBD Kab.	790.000,00
533.	132100203003	1-2	Printer	2013	Epson		APBD Kab.	5.000.000,00
534.	132100203003	3-4	Printer	2013	HP		APBD Kab.	3.700.000,00
535.	132100203003	1-2	Printer Inkjet Multifunction	2017	EPSON		APBD Kab.	8.515.980,00
536.	132100203003	3	Laserjet Printer	2017	FUJI XEROX		APBD Kab.	990.000,00
537.	132100203003	4-5	Inkjet Printer Multifunction	2017	EPSON		APBD Kab.	3.445.500,00
538.	132100203003	6	Inkjet Printer	2017	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	4.490.000,00
539.	132100203003	7	Laserjet Printer	2017	HP		APBD Kab.	5.350.000,00
540.	132100203003	8	Inkjet Printer Multifunction	2017	BROTHER	2400 x 600 dpi	APBD Kab.	3.410.252,00
541.	132100203003	9-10	Laserjet Printer	2017	HP	1200 x 1200 dpi	APBD Kab.	3.800.000,00
542.	132100203003	11	Inkjet Printer Multifunction	2017	EPSON	5760 X 1440 dpi	APBD Kab.	4.250.000,00
543.	132100203003	12	Laserjet Printer	2017	HP		APBD Kab.	1.470.000,00
544.	132100203003	1-2	Printer	2018	HP	57.58 x 11.88 mm	APBD Kab.	5.800.000,00
545.	132100203003	3-4	Printer	2018	EPSON	1440 X 720 dpi	APBD Kab.	5.800.000,00
546.	132100203003	5	Printer	2018	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	2.300.000,00
547.	132100203003	6-9	Printer	2018	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	8.929.500,00
548.	132100203003	8	Printer	2018	BROTHER	2400 X 600 dpi	APBD Kab.	2.963.500,00
549.	132100203003	1	Printer	2019	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	3.139.000,00
550.	132100203003	2-3	Printer	2019	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	6.314.000,00
551.	132100203003	4	Printer	2019	HP	600 X 600 DPI	APBD Kab.	5.382.500,00
552.	132100203003	1	Printer	2020	EPSON	A4	APBD Kab.	2.100.000,00
553.	132100203003	2	Printer	2020	EPSON		APBD Kab.	2.450.000,00
554.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	EPSON	5760 x 1440 dpi	APBD Kab.	4.315.000,00
555.	132100203003	1-2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	EPSON	A3	APBD Kab.	35.900.000,00
556.	132100203003	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	HP	A4	APBD Kab.	8.950.000,00
557.	132100203003	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	HP	A4	APBD Kab.	24.500.000,00
558.	132100203003	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	EPSON	A4	APBD Kab.	5.900.000,00
559.	132100203003	6	Printer	2023	EPSON	A4	APBD Kab.	5.900.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
560.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Epson		APBD Kab.	5.750.000,00
561.	132100203003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Epson		APBD Kab.	5.750.000,00
562.	132100203007	1	External Hardisk	2017	Western Digital	1 TB	APBD Kab.	925.000,00
563.	132100203007	2-6	External Hardisk	2017	THOSIBA	1 TB	APBD Kab.	4.988.500,00
564.	132100203007	8	External Hardisk	2017	WESTERN DIGITAL	1 TB	APBD Kab.	949.091,00
565.	132100203007	9	External Hardisk	2017		1 TB	APBD Kab.	1.000.000,00
566.	132100203007	1	Harddisk Eksternal	2018		1 TB	APBD Kab.	1.900.000,00
567.	132100203007	1-2	Hardisk External	2019	WD	1 TB	APBD Kab.	1.880.000,00
568.	132100203007	3	Hardisk External	2019	SEAGATE	2 TB	APBD Kab.	1.382.500,00
569.	132100203007	1-2	External	2020	THOSIBA	2 TB	APBD Kab.	2.662.000,00
570.	132100203007	3-8	External	2020	WD	2 TB	APBD Kab.	7.986.000,00
571.	132100203017	1	Hardisk Eksternal	2023	SEAGATE	1 TB	APBD Kab.	1.250.000,00
572.	132100203017	2	Fiber Optic Operating Hardisk 5T, USB 650 VA	2024	-		APBD Kab.	4.220.000,00
573.	132100203018	1	Tablet	2018	SAMSUNG	8 inch	APBD Kab.	6.980.000,00
574.	132100204001	1	Server	1993	HP		APBD Kab.	8.000.000,00
575.	132100204001	1	Server	2000	HP		APBD Kab.	33.600.000,00
576.	132100204001	2	Server	2000	IBM		APBD Kab.	48.000.000,00
577.	132100204001	1	Server	2003	Campaq		APBD Kab.	48.000.000,00
578.	132100204001	2	Server	2007	Xeon 3040	1 GB DDR2	APBD Kab.	15.700.000,00
579.	132100204001	1	Server	2014			APBD Kab.	49.000.000,00
580.	132100204001	1	CC Room	2015			APBD Kab.	683.966.500,00
581.	132100204001	1	Server	2017	MIKROBITS		APBD Kab.	41.379.248,00
582.	132100204001	2-4	Server	2017	SUPERMICRO	2 x 2 TB	APBD Kab.	170.468.400,00
583.	132100204001	1-2	Server	2018	DELL	6 TB	APBD Kab.	159.600.000,00
584.	132100204001	3	Komputer Server	2018	DELL		APBD Kab.	61.520.000,00
585.	132100204001	1-3	Server	2019	DELL	2 TB	APBD Kab.	180.000.000,00
586.	132100204001	4-13	Server	2019	DELL	2 TB	APBD Kab.	997.500.000,00
587.	132100204001	1-2	Server	2023	DELL		APBD Kab.	160.000.000,00
588.	132100204001	3-4	Server	2023	ZOAN		APBD Kab.	50.000.000,00
589.	132100204001	1	Server	2024	Dell		APBD Kab.	95.000.000,00
590.	132100204002	1	Router	2013			APBD Kab.	6.700.000,00
591.	132100204002	1-35	Router Board	2014	Standar Atheros		APBD Kab.	59.500.000,00
592.	132100204002	36-37	Router RoSLevel 4	2014	Mikrobits Ainos		APBD Kab.	35.000.000,00
593.	132100204002	38	Router	2014			APBD Kab.	41.000.000,00
594.	132100204002	1-19	Router Wireless	2017	MIKROTIK-2HnD	113 x 138 x 29 mm	APBD Kab.	19.136.425,00
595.	132100204002	1	Router	2019	CISCO		APBD Kab.	90.126.000,00
596.	132100204002	1	Router	2020	UBIQUITI		APBD Kab.	1.060.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
597.	132100204002	2-4	Router	2020	MIKROTIK		APBD Kab.	12.987.000,00
598.	132100204002	5-9	Router	2020	MIKROTIK		APBD Kab.	6.105.000,00
599.	132100204002	1	Router	2022	Mikrotik	2 GB RAM	APBD Kab.	8.900.000,00
600.	132100204003	1-2	Switch Hub 16 Port	2013			APBD Kab.	1.800.000,00
601.	132100204003	1	KVM Switch	2014			APBD Kab.	28.250.000,00
602.	132100204003	1-12	Hub	2020	D-LINK		APBD Kab.	9.240.000,00
603.	132100204003	17	Hub	2020		16 Port	APBD Kab.	1.017.500,00
604.	132100204004	1	Modem	2013	Huawei K3765		APBD Kab.	900.000,00
605.	132100204004	1-4	Modem	2018	HUAWEI		APBD Kab.	2.960.000,00
606.	132100204004	1-4	Modem	2020	BOLT+	150 Mbps	APBD Kab.	2.000.000,00
607.	132100204024	1	Switch	2022	D-LINK		APBD Kab.	2.186.500,00
608.	132100204024	2	Switch	2022	DLINK	24 Port	APBD Kab.	3.950.000,00
609.	132100204024	3	Switch	2022	D-LINK	24 Port	APBD Kab.	2.575.000,00
610.	132100204024	1-2	Switch	2023	D-LINK	24 GB	APBD Kab.	4.373.000,00
611.	132100204024	3	Switch	2023	D-LINK	8 port	APBD Kab.	900.000,00
612.	132100204024	1	Fiber Optic Operating D-Link Switch, D-Link DGS, Swich DGS 1100	2024	-		APBD Kab.	4.445.000,00
613.	1,321E+11	1-5	Acces Point	2022	TP-LINK		APBD Kab.	3.250.000,00
614.	132100204026	6-8	Acces Point	2022	TP Link		APBD Kab.	1.950.000,00
615.	132100204033	1	Jaringan Komputer	2013			APBD Kab.	49.900.000,00
616.	132100204033	2	Jaringan Internet / Finger Print	2013			APBD Kab.	6.950.000,00
617.	132100204033	1	Paket Peralatan Jaringan	2014			APBD Kab.	12.300.000,00
618.	132100204033	2-4	Peralatan Jaringan Lainnya	2014			APBD Kab.	2.850.000,00
619.	132100204033	1-5	Switch Managed	2017	TRENDNET	24 port	APBD Kab.	22.394.475,00
620.	132100204033	6-24	Acces Point	2017	UBIQUITI		APBD Kab.	25.897.371,00
621.	132100204033	1	Repeater	2018	Motorola		APBD Kab.	35.500.000,00
622.	132100204033	2	Rackmount Chassis	2018	TP-LINK	14 slot	APBD Kab.	4.400.000,00
623.	132100204033	3-16	Ethernet Media Converter	2018	TP-LINK	10/1000M	APBD Kab.	8.540.000,00
624.	132100204033	17-21	Router Wireless Dual band Gigabit	2018	TP-LINK		APBD Kab.	7.150.000,00
625.	132100204033	22-27	Router Wireless	2018	MIKROTIK		APBD Kab.	6.120.000,00
626.	132100204033	28-31	Transceiver	2018	D-LINK		APBD Kab.	4.280.000,00
627.	132100204033	32	Fiber Optik Tool Kit Set	2018	FTTH		APBD Kab.	4.770.000,00
628.	132100204033	33-37	Smart Switch	2018	D-LINK		APBD Kab.	11.400.000,00
629.	132100204033	38	Routerboard	2018	MIKROTIK		APBD Kab.	17.050.000,00
630.	132100204033	39-40	Routerboard	2018	MIKROTIK	12 LAN Port	APBD Kab.	24.640.000,00
631.	132100204033	1	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	TP Link		APBD Kab.	4.200.000,00
632.	132100204033	2-10	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	TP-LINK		APBD Kab.	6.075.000,00
633.	132100204033	11-30	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	UBIQUITI		APBD Kab.	10.000.000,00

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Asal usul / Cara	Harga Rp.
634.	132100204033	15	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	UBIQUITI		APBD Kab.	1.700.000,00
635.	132100204033	16-17	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	D-LINK		APBD Kab.	8.800.000,00
636.	132100204033	20	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	LINKSYS		APBD Kab.	6.250.000,00
637.	132100204033	22-23	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	Ubiquiti		APBD Kab.	3.410.000,00
638.	132100204033	24-27	Peralatan Jaringan Lainnya	2020	TP-LINK	3 Antena	APBD Kab.	2.596.000,00

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Banyumas
berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya (2024-2026)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi	Capaian	Keterangan
		2024	2025	2026	2024	2024	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91.5	95.5	92.5	96.66	104.5	Telah memenuhi target Renstra
2	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	80	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
3	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
4	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
5	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	3.3	3.6	3.7	4.09	110.54	Telah memenuhi target Renstra
7	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	91	100	95	100	105.26	Telah memenuhi target Renstra
8	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
9	Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra
10	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	67	100	73	100	136.99	Telah memenuhi target Renstra
11	Persentase sistem elektronik yang diamankan	100	100	100	100	100	Telah memenuhi target Renstra

Selaras dengan tugas dan fungsinya, Dinkominfo mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan kominfo, urusan statistik dan urusan persandian.

2.1.3.1. Urusan Kominfo

Urusan kominfo yang menjadi kewenangan Dinkominfo meliputi pengelolaan informasi publik dan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Kinerja urusan ini dapat dilihat dari capaian dalam Indikator Kinerja Utama Dinkominfo.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kominfo

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	94	93	90,5	98,92	96,66
2	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	2.75	2.73	2.60	3.39	4.09
3	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber:e-monev Dinkominfo

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan memperhitungkan Nilai Monev Website, Nilai Kuesioner Penilaian Mandiri, Nilai Verifikasi, dan Nilai Uji Publik. Hasil penilaian Nilai KIP dari tahun ke tahun mengalami dinamika. Hal ini disebabkan beberapa indikator penilaian yang bertambah (nilai medsos), proses klarifikasi, kehadiran pimpinan daerah, dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di OPD. Secara umum, nilai KIP yang diperoleh sangat baik dan sejak tahun 2021, selama 4 tahun berturut-turut, predikat yang diperoleh adalah Badan Publik Informatif.

Hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kemenpan RB dari tahun ke tahun, terutama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan pesat. Hal ini dikarenakan intensifnya proses pelaksanaan pemenuhan kriteria kriteria dalam penilaian SPBE sebagai evaluasi mengingat di tahun 2021 dan 2022 terdapat penambahan domain penilain SPBE yang menyebabkan penurunan nilai SPBE di dua tahun tersebut.

2.1.3.2. **Urusan Statistik**

Urusan statistik yang menjadi kewenangan Dinkominfo meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data statistik sektoral. Statistik sektoral yang dikelola mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Kinerja urusan ini dapat dilihat dari capaian dalam Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo.

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Statistik

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber:e-monev Dinkominfo

Data Statistik Sektoral yang dikelola diwujudkan dalam Buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas yang dicetak rutin setiap triwulan pertama atau kedua tahun berikutnya dan disajikan pula dalam aplikasi.

2.1.3.3. **Urusan Persandian**

Urusan persandian yang menjadi kewenangan Dinkominfo meliputi penyusunan kebijakan, penilaian risiko keamanan, pengukuran tingkat kematangan keamanan, peningkatan keamanan, penanganan insiden, penerapan sertifikat elektronik, edukasi kesadaran keamanan, analisa kebutuhan sumber daya keamanan baik pengguna maupun pengelola layanan keamanan, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia keamanan.

Kinerja urusan ini dapat dilihat dari capaian dalam Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Persandian

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber:e-monev Dinkominfo

Kinerja persandian ini meliputi penyusunan regulasi keamanan informasi, mendukung pemenuhan SPBE, layanan pembuatan tanda tangan elektronik (TTE), patroli siber, dan layanan IT security misalnya pemasangan *firewall* di *data center*, antivirus, enkripsi, sistem deteksi intrusi (IDS), pemantauan keamanan, pelatihan kesadaran siber, dan penanganan insiden keamanan.

2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinkominfo adalah semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinkominfo antara lain:

- b. BPS dalam hal tata kelola Satu Data Indonesia dan Data Sektoral Statistik,
- c. BSSN dalam hal tata kelola keamanan siber,
- d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal penyediaan Data Sektoral Statistik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Dinkominfo telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Perubahan Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 sebagian besar indikator sudah tercapai sesuai dengan target bahkan melampaui target yang ditetapkan, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan target apalagi jika dibandingkan dengan kondisi regional, dinamisnya capaian target tersebut dari tahun ke tahun, dan dampaknya terhadap publik yang dilayani.

Pertama, Nilai KIP di Kabupaten Banyumas belum optimal, yaitu pada tahun 2024 96,66 (kurang dari 100) dan dinamis, walaupun sudah berpredikat Badan Publik Informatif. Nilai KIP yang kurang optimal berisiko tidak terwujudnya tujuan-tujuan dari KIP sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, Capaian SPBE di Kabupaten Banyumas berkategori “Sangat Baik” (indeks 4,09), namun jika dibandingkan capaian SPBE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 kabupaten/kota yang mendapatkan kategori “Memuaskan”, 21 Kabupaten/Kota mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan sisanya berkategori “Baik”. Sehingga capaian SPBE di Kabupaten Banyumas belum optimal dan masih bisa ditingkatkan.

Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut::

1. Belum optimalnya pengelolaan SPBE;
2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinkominfo merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

2.2.2.1. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinkominfo yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah yang produktif menunjukkan performa ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

b. Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

c. Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah

daerah dimana warga masyarakat hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjabarkan kedalam 6 (enam) misi, yaitu :

- 1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing SDM
- 2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
- 3. Meningkatnya ketahanan pangan
- 4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan
- 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
- 6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinkominfo yaitu misi 5 (lima), meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka berikut merupakan perumusan isu strategis perangkat daerah dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi, dan lingkungan yang dinamis:

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu Nasional	Isu Global	Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	• Infrastruktur • Kemitraan global	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
2	Belum optimalnya pengelolaan SPBE	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik,	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan	Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan	• Infrastruktur • Kemitraan global	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

		keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	Berbasis Teknologi Informasi	publik yang berkualitas		
--	--	---	------------------------------------	----------------------------	--	--

Sumber :<https://eplanning.banyumaskab.go.id>

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas. Berdasarkan hasil perumusan isu strategis tersebut, dengan melihat permasalahan, potensi, dan berbagai isu baik isu KLHS, isu provinsi, isu nasional maupun isu global terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka isu strategis pada Dinkominfo adalah **"Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital"**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinkominfo yang mencakup urusan kominfo, urusan statistik, dan urusan persandian, maka beberapa isu-isu penting yang dapat menjadi tantangan bagi penyelenggaran tugas dan fungsinya antara lain:

1. Infrastruktur TIK:

Secara umum, Infrastruktur TIK yang ada terbatas dalam segi kualitas, kuantitas, keterbaruan teknologi, dan pemeliharaannya. Walaupun saat ini tetap diusahakan untuk mengikuti kebutuhan TIK yang makin modern dengan anggaran yang ada, akan tetapi perlu diakselerasi agar fasilitasi TIK misalnya pusat data dan jaringan FO serta berbagai aplikasi nya dapat mendukung pelayanan publik dan akses informasi dalam kerangka besar SPBE.

Infrastruktur TIK yang ada juga harus mendayagunakan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (*AI*) dan mahadata (*big data*), agar tetap terus relevan dan efisien dalam menjalankan fungsinya.

2. Keterbukaan Informasi Publik:

Memastikan penyampaian data dan informasi publik yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat adalah salah satu tugas penting Dinkominfo. Hal ini juga perlu dibarengi edukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi digital secara bijak dan aman dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan literasi digital.

3. Ketersediaan dan keamanan Data dan Informasi:

Pengelolaan data yang efektif dan efisien, terutama data statistik sektoral daerah, sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini sembari didukung dengan pengamanan data dan informasi (Keamanan Siber): Perlindungan terhadap sistem dan data informasi dari ancaman siber menjadi isu peting agar informasi pemerintah dan publik tetap aman.

4. Sumber Daya Manusia:

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK yang kompeten dan memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Dinkominfo makin menjadi isu penting dalam era kemajuan digital ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas dan fungsi Dinkominfo, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas Dinkominfo dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kominfo, statistik, dan persandian.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Juga dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinkominfo selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik”

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital;
3. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
4. Meningkatnya keamanan informasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkominfo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 5: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik		1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 3. Indeks Pemerintah Digital (IPD)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	1. Nilai Domain Manajemen SPBE 2. Nilai Domain Tata Kelola SPBE 3. Nilai Domain Layanan SPBE 4. Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital
		Meningkatnya Keamanan Informasi	1. Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital 2. Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital

Sumber: Dinkominfo Tahun 2025-2029

3.3. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang mampu menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah melalui koordinasi antar pemangku kepentingan;
2. Mengawal terwujudnya rencana kerja perangkat daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan kinerja perangkat daerah;
3. Mendorong optimalisasi implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik.

Tabel 3.2
Tabel Penahapan Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penyiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Penguatan Landasan Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Penyiapan Akselerasi Landasan Transformasi bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik secara berkualitas

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi transformasi layanan publik berbasis digital;
2. Penguatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkominfo tercantum pada Tabel 3.3.:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Menyusun perencanaan yang mampu menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah melalui koordinasi antar pemangku kepentingan Mengawal terwujudnya rencana kerja perangkat daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Mendorong optimalisasi implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Optimalisasi transformasi layanan publik berbasis digital
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Mendorong optimalisasi implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Penguatan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Mendorong optimalisasi implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinkominfo. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinkominfo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Diseminasi Informasi
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Penyusunan Konten
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

- Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja serta pendanaan Dinkominfo Tahun 2025-2029 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2030 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkominfo Tahun 2025-2030

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	Tujuan OPD	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,09	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35
2		Tujuan OPD	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	96,66	96,86	97,06	97,26	97,46	97,66	97,86
3		Tujuan OPD	Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	1,7	1,7	2	2	2,2
4	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Sasaran OPD	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,8	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05
5		Sasaran OPD	Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4,69	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89	4,94
6		Sasaran OPD	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	1,5	1,5	2	2	2,2
7		Sasaran OPD	Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik	%	78	80	85	87	91	94	96
9	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	N/A	65	70	75	80	85	90
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Relasi Media	Sub Kegiatan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 251.450.000	Rp. 30.000.000	Rp. 50.179.992	Rp. 51.196.209	Rp. 52.653.586	Rp. 54.053.438	Rp. 54.736.106
13	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Sub Kegiatan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	29	29	29	29	29	29
					Rp. 14.828.303	Rp. 30.000.000	Rp. 30.669.995	Rp. 31.291.106	Rp. 32.181.855	Rp. 33.037.444	Rp. 33.454.690
14	Pelayanan Informasi Publik	Sub Kegiatan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	12	5	5	5	5	5
					Rp. 253.805.000	Rp. 56.000.000	Rp. 74.077.489	Rp. 75.577.661	Rp. 77.729.098	Rp. 79.795.608	Rp. 80.803.385
15		Sub Kegiatan	Persentase khalayak sasaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		Rp. 828.728.400	Rp. 550.000.000	Rp. 655.619.301	Rp. 668.896.511	Rp. 687.937.690	Rp. 706.227.242	Rp. 715.146.529
16	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Sub Kegiatan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 8.509.224	Rp. 41.604.423	Rp. 49.277.393	Rp. 50.275.329	Rp. 51.706.494	Rp. 53.081.166	Rp. 53.751.555
17	Diseminasi Informasi	Sub Kegiatan	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100
						Rp. 60.000.000	Rp. 65.194.040	Rp. 66.514.311	Rp. 68.407.744	Rp. 70.226.436	Rp. 71.113.360
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	12	12	12	12	12	12	12
					Rp. 97.087.000	Rp. 45.000.000	Rp. 62.552.240	Rp. 63.819.012	Rp. 65.635.719	Rp. 67.380.714	Rp. 68.231.698

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Penyusunan Konten	Sub Kegiatan	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	140	140	145	150	155	160	175
					Rp. 257.727.550	Rp. 220.000.000	Rp. 241.379.963	Rp. 246.268.247	Rp. 253.278.654	Rp. 260.012.336	Rp. 263.296.158
20	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Sub Kegiatan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	56	55	55	55	55	55	55
					Rp. 14.758.000	Rp. 197.250.000	Rp. 79.452.587	Rp. 81.061.614	Rp. 83.369.160	Rp. 85.585.616	Rp. 86.666.519
21	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program	Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
22	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	100
23	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	80	82	84	86	88	90

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Persentase Nama Domain yang Dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 24.238.500	Rp. 40.000.000	Rp. 49.999.983	Rp. 51.014.679	Rp. 52.468.194	Rp. 53.862.557	Rp. 54.544.950
26	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	30	30	30	32	35	38	40
					Rp. 937.126.292	Rp. 1.183.091.000	Rp. 1.455.104.978	Rp. 1.484.634.742	Rp. 1.526.935.181	Rp. 1.567.514.090	Rp. 1.587.373.163

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Sub Kegiatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	6	6	6	6	6	6	6
					Rp. 265.590.306	Rp. 250.000.000	Rp. 423.907.647	Rp. 432.510.389	Rp. 444.833.542	Rp. 456.655.170	Rp. 462.440.604
29	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 36.969.791	Rp. 153.978.600	Rp. 108.907.310	Rp. 111.117.466	Rp. 114.283.442	Rp. 117.320.570	Rp. 118.806.922
30	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Sub Kegiatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1
						Rp. 65.000.000	Rp. 86.964.869	Rp. 88.729.725	Rp. 91.257.826	Rp. 93.683.040	Rp. 94.869.924

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
31	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 89.239.500	Rp. 100.000.000	Rp. 140.359.450	Rp. 143.207.891	Rp. 147.288.192	Rp. 151.202.435	Rp. 153.118.040
32	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Sub Kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
					Rp. 41.267.492	Rp. 153.351.711	Rp. 101.426.763	Rp. 103.485.108	Rp. 106.433.623	Rp. 109.262.138	Rp. 110.646.397
33	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Sasaran OPD	Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0,5	0,5	1	1	1,5
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,8	2,8	2,88	2,88	2,96	2,96	3

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
35		Program	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
36		Program	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
37	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	%	40	50	60	70	80	90	90
38	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Sub Kegiatan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	50	50	60	70	80	90	90
					Rp. 17.833.400	Rp. 18.840.200	Rp. 15.869.985	Rp. 16.190.440	Rp. 16.642.605	Rp. 17.080.185	Rp. 17.284.389

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Sub Kegiatan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100	100	100	100	100	100
					Rp. 49.357.000	Rp. 47.267.804	Rp. 92.933.015	Rp. 94.809.560	Rp. 97.457.395	Rp. 100.019.815	Rp. 101.215.611
40	Meningkatnya Keamanan Informasi	Sasaran OPD	Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0,3	0,3	1	1	1,5
41		Sasaran OPD	Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0,3	0,3	1	1	1,5
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Program	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	396	441	487	530	575	620	647
43	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Persentase sistem elektronik yang diamankan	%	5	10	30	50	70	80	90
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	13	13	13	13	13	13	13

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp. 39.471.500	Rp. 51.492.401	Rp. 60.557.345	Rp. 62.620.613	Rp. 64.387.338	Rp. 66.097.978	Rp. 66.911.232
45	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	56	54	54	54	54	54	54
					Rp. 22.528.470	Rp. 132.125.382	Rp. 158.320.655	Rp. 160.679.387	Rp. 165.212.662	Rp. 169.602.022	Rp. 171.688.768
46	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Sasaran OPD	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,41	3,51	3,52	3,53	3,54	3,545	3,55
47		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,75	85,8	85,85	85,9	85,95	86	86,05
48		Sasaran OPD	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3.546	3.526	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	IKM Perangkat Daerah	Angka	89,26	95	95,5	96	96,5	97	97,5
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96	96	97	97	97	97	97
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80,88	80,88	80,89	80,9	80,91	80,92	80,93
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Nilai kematangan organisasi	Angka	46	46	46	46	46	46	46

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
54	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
55	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100	100	100	100	100	100
56	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan / Dokumen	4	4	4	4	4	4	6
					Rp. 3.506.000	Rp. 24.995.984	Rp. 29.800.900	Rp. 30.405.711	Rp. 31.272.146	Rp. 32.103.974	Rp. 32.511.652
57	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	19	19	19	19	19	19
					Rp. 7.143.115	Rp. 34.820.000	Rp. 41.721.250	Rp. 42.567.984	Rp. 43.780.993	Rp. 44.945.552	Rp. 45.516.302

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
58	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
59	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
60	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
					Rp. 62.210.000	Rp. 125.880.000	Rp. 151.432.400	Rp. 154.505.727	Rp. 158.908.493	Rp. 163.135.401	Rp. 165.207.008
61	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	60	47	47	50	50	50
					Rp. 6.158.671.761	Rp. 7.170.679.782	Rp. 8.547.703.007	Rp. 8.721.178.995	Rp. 8.969.696.043	Rp. 9.208.286.697	Rp. 9.325.219.929
62	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
63	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	76,14	78	78,1	78,2	78,3	78,4	78,5
64		Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen	Paket	14	3	4	4	4	4	4

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Rp. 22.195.400	Rp. 19.460.614	Rp. 23.156.890	Rp. 23.626.860	Rp. 24.300.127	Rp. 24.946.501	Rp. 25.263.289
65	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	4	4	4	4	4
					Rp. 48.282.600	Rp. 90.751.185	Rp. 108.178.600	Rp. 110.374.089	Rp. 113.519.288	Rp. 116.538.860	Rp. 118.018.752
66	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	4	4	4	4	4	4
					Rp. 42.545.800	Rp. 32.022.722	Rp. 38.172.200	Rp. 38.946.906	Rp. 40.056.730	Rp. 41.122.224	Rp. 41.644.423
67	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12
					Rp. 208.886.017	Rp. 202.239.873	Rp. 241.077.000	Rp. 245.969.668	Rp. 252.978.772	Rp. 259.707.916	Rp. 263.005.868
68	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	10	10	10	10	10
					Rp. 30.385.400	Rp. 54.446.280	Rp. 64.901.900	Rp. 66.219.087	Rp. 68.106.053	Rp. 69.917.649	Rp. 70.805.513
69	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	52	12	12	12	12	12
					Rp. 193.248.791	Rp. 176.784.377	Rp. 210.733.200	Rp. 215.010.039	Rp. 221.136.924	Rp. 227.019.086	Rp. 229.901.932
70	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
						Rp. 1.000.000	Rp. 4.516.501	Rp. 4.608.164	Rp. 4.739.477	Rp. 4.865.546	Rp. 4.927.331

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
71	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	25	25	35	35	35	35	35
72	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
73	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10	3	3	3	3	3
					Rp. 80.700.000	Rp. 22.709.293	Rp. 23.786.661	Rp. 24.269.414	Rp. 24.960.990	Rp. 25.624.942	Rp. 25.950.346
74	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	3	15	10	10	10	10
					Rp. 15.300.000	Rp. 86.854.730	Rp. 109.854.747	Rp. 112.084.254	Rp. 115.278.631	Rp. 118.344.543	Rp. 119.847.364
75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	2	2	2	2	2
						Rp. 1.634.006	Rp. 1.958.500	Rp. 1.998.248	Rp. 2.055.189	Rp. 2.109.856	Rp. 2.136.649

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
76	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
77	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12
					Rp. 251.941.515	Rp. 254.434.888	Rp. 303.295.300	Rp. 309.450.691	Rp. 318.268.739	Rp. 326.734.572	Rp. 330.883.674
78	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12
					Rp. 1.914.719.636	Rp. 1.775.671.154	Rp. 2.116.662.502	Rp. 2.159.620.255	Rp. 2.221.160.381	Rp. 2.280.242.439	Rp. 2.309.198.544
79	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
80	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	65	67	70	72	74	76	78
81	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	42	31	26	26	26	26	26

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rp. 184.616.350	Rp. 154.230.587	Rp. 183.848.300	Rp. 187.579.509	Rp. 192.924.739	Rp. 198.056.467	Rp. 200.571.526
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	4	4	4	4	4
					Rp. 38.176.000	Rp. 139.125.528	Rp. 165.842.492	Rp. 169.208.281	Rp. 174.030.007	Rp. 178.659.142	Rp. 180.927.880
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	10	12	12	12	12	12
					Rp. 10.012.250	Rp. 7.853.570	Rp. 9.332.650	Rp. 9.522.057	Rp. 9.793.395	Rp. 10.053.896	Rp. 10.181.568
84	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	10	10	10	10	10	10
						Rp. 4.864.358	Rp. 5.798.500	Rp. 5.916.181	Rp. 6.084.767	Rp. 6.246.620	Rp. 6.325.944
85	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	12	35	35	35	35	35
					Rp. 116.624.200	Rp. 162.000.000	Rp. 103.536.600	Rp. 105.637.880	Rp. 108.648.116	Rp. 111.538.117	Rp. 112.954.506

4.2. Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam dokumen Renstra Dinkominfo disajikan pula daftar Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, yaitu pada program prioritas di urusan Kominfo sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uraian Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Relasi Media	MISI 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Diseminasi Informasi	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
----	---	--	--	--

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinkominfo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinkominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinkominfo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinkominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinkominfo selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinkominfo.

Indikator kinerja Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4.09	4.10	4.15	4.20	4.25	4.30	4.35
2	Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	1.7	1.7	2	2	2.2
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	96.66	96.86	97.06	97.26	97.46	97.66	97.86
4	Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	2.55	2.6	2.65	2.7	2.75	2.8	2.85
5	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3.8	3.8	3.85	3.9	3.95	4	4.05
6	Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4.69	4.69	4.74	4.79	4.84	4.89	4.94
7	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	1.5	1.5	2.0	2.0	2.2
8	Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0.3	0.3	1.0	1.0	1.5
9	Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0.3	0.3	1.0	1.0	1.5
10	Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	N/A	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5
11	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3.41	3.51	3.52	3.53	3.54	3.545	3.55
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,75	85,8	85,85	85,9	85,95	86	86,05
13	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3.546	3.526	3.55	3.6	3.65	3.7	3.75

Sumber: e-planning Banyumas

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Berikut disajikan data Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Banyumas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	441	487	530	575	620	647	

BAB V PENUTUP

Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo dalam jangka waktu lima tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinkominfo menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Dinkominfo dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinkominfo agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Dinkominfo agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinkominfo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780522 199703 1 003

REGISTER RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terjadinya pelanggaran UU KIP	Kurangnya pemahaman publik dan Perangkat Daerah atas penerapan UU KIP	Penurunan kepercayaan publik	Masyarakat, OPD	Sosialisasi UU KIP melalui tatap muka, media digital, dan media massa	KE	Sarana sosialisasi yang ada tidak menjangkau seluruh target masyarakat yang diharapkan memahami UU KIP	Penyusunan panduan praktis penerapan UU KIP, surat edaran pelaksanaan UU KIP dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten	Kadinkominfo	2028
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Informasi Publik	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik tidak berjalan	Tingginya ketergantungan pada aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis digital	1. Tidak berjalannya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik 2. Penurunan kepercayaan publik	OPD dan Masyarakat	Penguatan kualitas aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik beserta infrastruktur pendukungnya	KE (Kurang Efektif)	Aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik tetap mengalami kendala sewaktu diakses	Penyusunan rencana mitigasi berbasis manual sebagai cadangan mekanisme layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis digital	Kadinkominfo	2029

Purwokerto, 22 September 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS


BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780522 199703 1 003